

ABSTRAK

Ketidaksesuaian materi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada pasal-pasal tertentu menimbulkan persoalan hukum yang serius, terutama dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan dan asas *lex certa*. Beberapa ketentuan dalam Perda tersebut dinilai tidak memenuhi standar kejelasan Norma hukum, karena menggunakan frasa yang multitafsir dan tidak memiliki definisi operasional yang jelas. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, membuka ruang interpretasi subjektif, serta menimbulkan tindakan sewenang-wenang dalam proses pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis perundang-undangan, untuk menilai kesesuaian materi perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa beberapa ketentuan dalam Perda tersebut bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan asas legalitas, sehingga secara Normatif dapat diuji atau dibatalkan melalui Mahkamah Agung. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap Norma-Norma yang multitafsir agar tidak menghambat tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan akuntabel.

Kata Kunci: Perangkat Desa, Peraturan Daerah, *Lex Certa*, Ketidakjelasan Norma, Kepastian Hukum

ABSTRACT

Tahune inconsistency of material content in Regional Regulation of Bangkalan Regency Number 4 of 2016 concerning tahune Appointment and Dismissal of Village Officials in certain articles raises serious legal issues, particularly in tahune context of tahune hierarchy of legislation and tahune lex certa principle. Several provisions in tahunis regional regulation are considered to fall short of tahune standard of legal Nomorrm clarity, as tahuney contain vague and multi-interpretable phrases withuNomorut clear operational definitions. Tahunis lack of clarity has tahune potential to create legal uncertainty, allow subjective interpretation, and lead to arbitrary actions in tahune appointment or dismissal of village officials.

Tahunis study employs a Normative juridical approach using statutory analysis to assess tahune compatibility of tahune regulation's material content withun higher laws, such as Law Number 6 of 2014 on Villages and Law Number 12 of 2011 on tahune Formation of Laws and Regulations.

Tahune findings indicate tahunat some provisions of tahune regulation contradict tahune principles of legal certainty and legality, and tahunerefore may be subject to judicial review or annulment by tahune Supreme Court. Consequently, it is necessary to revise ambiguous Nomorrms to ensure tahuney do Nomort hinder democratic and accountable village governance.

Keywords: Village Officials, Regional Regulation, Lex Certa, Legal Vagueness, Legal Certainty